

REPRODUKSI SOSIAL DAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI: ANALISIS STRUKTUR KEMISKINAN, BUDAYA, DAN AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR SAMPANG MADURA

Johan Saputra¹, Indra Jaya Kusuma Wardhana², Arie Wahyu Pranata³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura
Email: Johansptra73@gmail.com

Abstract

The phenomenon of early marriage in the coastal areas of Sampang Regency reflects a complex form of social reproduction between the structures of poverty, cultural values, and power relations in Madurese society. The present study aims to analyse how the practice of early marriage is maintained through social reproduction mechanisms rooted in the habitus of poverty and a patriarchal cultural value system. The present study employs an ethnomethodological approach. The present study focuses on the assumption of 'subjectivity' and the interpretive actions that produce and organise everyday experiences through the perspectives of stakeholders, including the organisational structure of educational institutions and local government agencies regarding the practice of early marriage in the context of access to education, poverty, and Madurese cultural values. Meanwhile, Bourdieu's theory of social reproduction is utilised to examine the connection between habitus, social capital, and objective structures that perpetuate this practice. The findings of the study demonstrate that early marriage is deeply entrenched in bodily experiences intertwined with socioeconomic factors, social prestige, and religious beliefs. The pervasive influence of poverty and the restricted access to education that characterises these communities engenders a symbolic reproduction that serves to normalise the practice of early marriage as a means of escaping the pervasive social vulnerability experienced by these individuals. Conversely, Madurese cultural values that emphasise obedience to family authority and tradition serve to reinforce the moral legitimacy of early marriage. This phenomenon demonstrates that the social reproduction of early marriage is driven not only by objective structures but also by subjective experiences embodied in the bodies and social consciousness of the community. These findings indicate that social interventions must consider both structural and cultural dimensions concurrently to facilitate sustainable social transformation.

Keywords : Social Reproduction, Early Marriage, Education, Poverty, Culture

Abstrak

Fenomena pernikahan dini di wilayah pesisir Kabupaten Sampang merefleksikan bentuk reproduksi sosial yang kompleks antara struktur kemiskinan, nilai-nilai budaya, dan relasi kuasa dalam masyarakat Madura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pernikahan dini dipertahankan melalui mekanisme reproduksi sosial yang berakar pada habitus kemiskinan dan sistem nilai kultural yang patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi. Studi ini menitikberatkan pada asumsi “subjektivitas” serta tindakan interpretatif yang memproduksi serta mengorganisir pengalaman sehari-hari melalui pandangan stakeholder meliputi struktur organisasi lembaga pendidikan dan perangkat pemerintahan daerah mengenai praktik pernikahan dini dalam konteks akses pendidikan, kemiskinan dan nilai-nilai budaya Madura. Sementara teori reproduksi sosial Bourdieu digunakan untuk membaca keterhubungan antara habitus, modal sosial, dan struktur objektif yang melanggengkan praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berakar pada pengalaman tubuh yang terikat pada



kemiskinan, kehormatan, dan religiusitas. Habitus kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan menciptakan reproduksi simbolik yang menormalisasi praktik pernikahan dini sebagai jalan keluar dari kerentanan sosial. Di sisi lain, nilai budaya Madura yang menekankan kepatuhan terhadap otoritas keluarga dan tradisi memperkuat legitimasi moral atas praktik pernikahan dini. Fenomena ini menunjukkan bahwa reproduksi sosial pernikahan dini tidak hanya beroperasi melalui struktur objektif, tetapi juga melalui pengalaman subjektif yang terinkarnasi dalam tubuh dan kesadaran sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi sosial perlu memperhitungkan dimensi struktural dan kultural secara simultan untuk mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Reproduksi sosial, Pernikahan dini, Pendidikan, Kemiskinan, Budaya

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan ketika salah satu atau kedua calon pasangan masih berusia dibawah 19 tahun. Hal ini merupakan fenomena sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Data penelitian di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang reproduksi dan kesiapan hidup rumah tangga masih terbatas, yang berpotensi memperkuat kerentanan terhadap pernikahan dini (Yuni, 2020). Karakteristik di wilayah ini yang meliputi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, akses pendidikan yang terbatas, serta tradisi kultural yang kuat hal ini menjadikannya konteks yang sangat relevan untuk dipahami lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa praktik pernikahan dini bukan sekedar masalah individual atau keluarga, melainkan juga merupakan bentuk reproduksi sosial yang terus berjalan melalui jaringan struktur sosial, budaya, dan pendidikan. Dengan kata lain, memahami pernikahan dini dalam konteks Sampang Madura berarti menelusuri bagaimana mekanisme habitus kemiskinan, modal sosial terbatas, dan nilai-nilai budaya patriarkal bersinergi dalam mempertahankan praktik tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak dapat dipahami hanya sebagai keputusan individu, tetapi sebagai bagian dari mekanisme reproduksi sosial, di mana pola-pola perilaku dan nilai-nilai tertentu diwariskan secara turun-temurun melalui struktur sosial dan habitus. Dalam konteks masyarakat pesisir Sampang, habitus kemiskinan, keterbatasan pendidikan, serta nilai kehormatan (*moro*, *andhap asor*, dan kepatuhan terhadap otoritas keluarga) membentuk kerangka sosial yang menormalisasi praktik pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan bermartabat. Selain faktor budaya, kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor informal seperti nelayan dan buruh tambak juga memperkuat kerentanan sosial. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan minimnya akses terhadap pendidikan formal

semakin mempersempit peluang untuk mobilitas sosial. Dalam kondisi ini, pernikahan dini berfungsi sebagai strategi adaptif untuk menghindari stigma sosial dan menstabilkan ekonomi keluarga.

Hipotesis dalam praktik pernikahan dini di masyarakat pesisir Kabupaten Sampang merupakan hasil dari proses reproduksi sosial yang melibatkan interaksi antara habitus kemiskinan yang telah terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat, dengan struktur objektif yang membatasi akses pendidikan dan modal sosial, serta sistem nilai budaya patriarkal dan menegaskan kepatuhan terhadap tradisi keluarga. Dengan demikian, pernikahan dini bukan sekedar kesalahan dalam pilihan individu, akan tetapi bagian dari sistem sosial yang mempertahankan dirinya.

Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia dan khususnya di Madura. Sebuah kajian kualitatif di Madura menyoroti bahwa tradisi kawin paksa (kawin/paksa anak perempuan) masih berlangsung dalam masyarakat Madura, dimana perempuan masih menikah di usia sangat muda (<18 tahun) karena kombinasi norma budaya, kehormatan keluarga, dan ekonomi (Masthuriyah, 2015). Dari teori sosial, konsep reproduksi sosial dari Pierre Bourdieu melalui konsep habitus, modal (ekonomi, sosial, simbolik) dan arena (*field*) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana praktik sosial seperti pernikahan dini dapat terpelihara secara sistematis (Magda).

Dengan demikian, literatur sebelumnya memberi pijakan bahwa pernikahan dini terkait dengan pendidikan rendah, kemiskinan, norma budaya patriarkal, dan bahwa analisis reproduksi sosial dapat menambah tentang pemahaman fenomena ini. Namun, masih sedikit studi yang secara khusus menggabungkan ketiga elemen seperti struktur kemiskinan, budaya lokal Madura, dan akses pendidikan dalam satu kerangka reproduksi sosial di wilayah pesisir Sampang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme sosial dan budaya yang memungkinkan praktik pernikahan dini tetap berlangsung di masyarakat pesisir Kabupaten Sampang. Menganalisis bagaimana struktur kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan nilai budaya lokal khususnya nilai Madura yang menekankan kehormatan keluarga, kepatuhan, dan tradisi patriarkal bersinergi dalam proses reproduksi sosial pernikahan dini. Menganalisis bagaimana struktur kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan nilai budaya lokal khususnya nilai Madura yang menekankan kehormatan keluarga, kepatuhan, dan tradisi patriarkal bersinergi dalam proses reproduksi sosial pernikahan dini. Memberikan rekomendasi intervensi sosial yang mempertimbangkan sekaligus dimensi struktural (ekonomi, pendidikan) dan kultural (habitus, nilai, tradisi) untuk mendorong transformasi sosial yang

berkelanjutan dalam pencegahan pernikahan dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnometodologi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aktor sosial di masyarakat pesisir Sampang Madura memaknai dan mengorganisir realitas sosial terkait praktik pernikahan dini. Etnometodologi berfokus pada cara individu dan kelompok sosial menginterpretasikan pengalaman mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan struktur kemiskinan, akses pendidikan, dan nilai budaya Madura yang patriarkal. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggali makna subjektif dan tindakan sosial yang mengganggu praktik pernikahan dini melalui mekanisme reproduksi sosial. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung berinteraksi dengan informan di lapangan.

Fokus penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aktor sosial (stakeholder lokal seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, perangkat desa, dan keluarga) menafsirkan dan mengorganisir pengalaman sehari-hari terkait praktik pernikahan dini yang bagaimana mereka menjelaskan, membenarkan, atau mempertahankan praktik tersebut melalui interaksi sosial mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti mengutamakan subjektivitas pelaku dengan tindakan interpretatif, narasi pengalaman, dan layanan makna sosial sebagai sumber data. Secara analitis, teori reproduksi sosial Bourdieu digunakan sebagai lensa untuk membaca bagaimana habitus, modal/sosial kultural, dan struktur objektif (ekonomi, pendidikan) saling berkaitan dalam menghadirkan dan mempertahankan praktik pernikahan dini.

Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, yang dikenal memiliki karakteristik sosial-ekonomi masyarakat nelayan, tingkat kemiskinan relatif tinggi, serta tradisi budaya Madura yang kuat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki prevalensi pernikahan dini yang signifikan dan menjadi representasi struktur sosial budaya Madura yang khas. Karakteristik utama ialah masyarakat nelayan pesisir dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses pendidikan terbatas, tradisi Madura yang kuat, serta norma kultural yang menekankan kepatuhan terhadap otoritas keluarga dan tradisi. Sebagai organisme sosial, masyarakat ini memiliki struktur sosial yang meliputi jaringan keluarga besar, perangkat pemerintah lokal, lembaga pendidikan (formal/non formal) dan institusi adat. Kerangka ini merujuk pada unit analisis keluarga, pasangan muda, lembaga pendidikan, dan

perangkat pemerintah setempat.

Hasil dan Pembahasan

Temuan habitus kemiskinan dan normalisasi pernikahan dini dalam masyarakat pesisir Kabupaten Sampang (Madura) ditemukan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang terbatas (misalnya nelayan dengan penghasilan musiman) mengkonstruksi persepsi bahwa menikah muda adalah jalan “logis” atau aman untuk anak perempuan. Petikan wawancara dengan salah satu masyarakat pesisir di Kabupaten Sampang:

“Kalau anak perempuan sudah lulus SD tapi tidak bisa lanjut sekolah karena biaya, ya lebih baik dinikahkan saja. Kasihan kalau di rumah terus, nanti jadi omongan orang.”
(Ibu T, usia 45 tahun)

Data dari dokumen lokal menunjukkan angka kemiskinan di wilayah pesisir ini berada di atas rata-rata provinsi, dan banyak remaja perempuan yang berhenti sekolah setelah SMP. Analisis dalam kerangka teori Pierre Bourdieu, kondisi di atas menggambarkan bagaimana habitus kemiskinan yaitu disposisi yang terbentuk dari pengalaman hidup sehari-hari dalam kondisi ekonomi terbatas yang memengaruhi tindakan sosial seperti pernikahan dini. Habitus ini kemudian konsisten dengan struktur objektif (kemiskinan, rendahnya akses pendidikan) dan menghasilkan praktik sosial yang mereproduksi ketimpangan. Praktik menikahkan anak perempuan muda menjadi “normal” dalam konteks tersebut. Hal ini sejajar dengan temuan jurnal *“Determinant Factors Of Early Marriage On Adolescent Reproductive Health In Madura Island”* yang menunjukkan bahwa pendidikan rendah secara signifikan terkait dengan pernikahan dini (Permatasari Dian, 2023). Namun, keunikan dari temuan adalah bahwa di masyarakat pesisir Sampang, meskipun akses ke laut dan potensi ekonomi nelayan ada, masih tetap muncul logika menikah muda yang menunjukkan bahwa bukan hanya faktor ekonomi absolut, tetapi juga mekanisme sosial-kultural yang aktif.

Temuan ini signifikan karena menunjukkan bahwa intervensi semata-mata berbasis ekonomi (misalnya bantuan keuangan) belum cukup bila habitus kemiskinan sudah tertanam dalam bentuk normatif. Sementara literatur lain (seperti “Gender Bias in Child Marriage in Madura”) menyoroti aspek norma gender dan patriarki (Kurniasari Dyah Netty, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa ekonomi dan budaya berpadu: kemiskinan menciptakan kerentanan, dan budaya memberikan kerangka legitimasi. Perbedaan dengan literatur sebelumnya adalah fokus Anda pada konteks pesisir yang lebih spesifik (nelayan) sehingga menunjukkan bahwa konstelasi

ekonomi spesifik (musiman, informal) menghasilkan bentuk reproduksi sosial yang agak berbeda. Temuan budaya kehormatan, modal sosial dan legitimasi pernikahan dini. Dari hasil wawancara informan laki-laki dan tokoh adat menyampaikan bahwa dalam masyarakat Madura, nilai kehormatan keluarga (*ajhina*) dan tradisi “lebih baik cepat menikah daripada aib” masih kuat.

“Kalau anak gadis sering keluar malam, walau tidak berbuat apa-apa, tetap saja jadi pembicaraan. Daripada malu, lebih baik dinikahkan cepat.” (Bapak H, usia 53)

Analisis dalam kerangka Bourdieu, aspek budaya ini bisa dilihat sebagai modal simbolik — yaitu nilai-nilai yang diinternalisasi dan memberikan penghargaan sosial kepada keluarga yang “taat adat.” Keluarga yang menikahkan anak muda dapat memperoleh pengakuan sosial (*symbolic capital*) dan mempertahankan statusnya dalam komunitas. Praktik ini menjadi bagian dari mesin reproduksi sosial karena menyediakan legitimasi moral dan sosial yang kuat bagi pernikahan dini, bukan hanya karena tekanan ekonomi. Selain faktor ekonomi, temuan lain menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Madura seperti kehormatan keluarga (*ajhina*), kepatuhan terhadap orang tua, dan perlindungan terhadap nama baik menjadi sumber legitimasi moral atas praktik pernikahan dini. Salah satu tokoh masyarakat (Bapak H, 53 tahun) menyampaikan:

“Kalau anak gadis sering keluar malam, walau tidak berbuat apa-apa, tetap saja jadi pembicaraan. Daripada malu, lebih baik dinikahkan cepat.”

Nilai budaya ini membentuk modal sosial dan simbolik yang menentukan posisi sosial keluarga dalam komunitas. Dalam konteks Bourdieu, keluarga memperoleh “kehormatan sosial” (*symbolic capital*) melalui tindakan yang dianggap selaras dengan norma adat, bahkan jika tindakan tersebut secara struktural memperkuat ketidaksetaraan gender. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi yang hanya fokus pada peningkatan pendidikan atau ekonomi tanpa memperhitungkan nilai-nilai budaya akan menemui hambatan. Budaya kehormatan dan modal sosial menjadi penguat praktik. Uniknya, dalam konteks pesisir Sampang, modal sosial komunitas nelayan (solidaritas, reputasi) memperkuat mekanisme budaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial harus mempertimbangkan dialog budaya dan rekonfigurasi modal sosial bukan hanya investasi material.

Temuan akses pendidikan dan reproduksi sosial pernikahan dini dari hasil survei lapangan di sekolah menengah pertama (SMP) di Sampang menunjukkan persentase tinggi remaja perempuan yang berhenti sekolah setelah SMP atau bahkan SD. Wawancara dengan guru BK di sekolah menengah pertama menyatakan:

“Banyak siswi yang memilih keluar sekolah karena biaya atau karena sudah

‘dipersiapkan’ untuk menikah, sehingga sekolah dianggap tidak relevan.” (Guru A)

Analisis dalam akses pendidikan yang terbatas (struktur objektif) memposisikan keluarga dalam situasi di mana pernikahan dini menjadi “pilihan” pragmatis. Dari perspektif reproduksi sosial, pendidikan adalah salah satu bentuk modal budaya (*cultural capital*) yang dapat mengganggu arus reproduksi ketimpangan. Namun bila modal budaya ini rendah atau tidak diperoleh, maka reproduksi sosial berjalan melalui jalur alternatif yaitu pernikahan dini sebagai pengalihan strategi. Sebagai pembanding, jurnal “*Determinant Model Of Early Marriage On The Promotion...*” menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan faktor dominan pernikahan dini (Permatasasi Dian, 2022). Temuan ini memperkuat hal tersebut akan tetapi juga menunjukkan bahwa dalam konteks pesisir Sampang, meskipun terdapat sekolah menengah, faktor motivasi keluarga dan budaya kadang lebih dominan daripada jarak fisik sekolah.

Temuan ini membawa implikasi bahwa akses saja (kehadiran sekolah) tidak cukup jika motivasi dan konteks keluarga masih menilai pendidikan rendah nilai dibanding menikah muda. Ini menunjukkan bahwa program intervensi perlu merangkul aspek motivasi dan persuasi budaya serta mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan nilai. Keunikannya adalah bahwa dalam setting pesisir, sekolah sering tidak dipandang sebagai jalur mobilitas sosial yang nyata (karena pekerjaan nelayan dianggap lebih realistis) hal yang berbeda dari studi di area pedesaan agraris yang lebih banyak termotivasi sekolah.

Analisis dalam kerangka reproduksi sosial Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana struktur objektif dan habitus kultural saling memproduksi praktik sosial seperti pernikahan dini. Kombinasi modal sosial rendah + habitus patriarkal + struktur pendidikan yang lemah menciptakan “banjir” reproduksi simbolik: praktik pernikahan dini terus berlangsung. Ini menunjukkan bahwa perubahan perlu simultan di struktur dan kultural bukan hanya satu dimensi. Beberapa studi hanya menyoroti budaya atau ekonomi. Dengan studi ini menunjukkan interaksi yang lebih kompleks. Keunikan: setting pesisir nelayan memberikan layer tambahan pekerjaan informal, fluktuasi penghasilan yang mempercepat siklus reproduksi sosial. Temuan ini menggarisbawahi bahwa intervensi perlu terintegrasi: misalnya peningkatan pekerjaan alternatif untuk remaja perempuan, pendidikan nilai yang menantang norma patriarkal, dan akses pendidikan yang relevan dengan kondisi pesisir. Perbedaan dengan literatur seperti “*Evaluating the Implementation of the Marriage Law in Madura*” adalah bahwa Anda tidak hanya melihat regulasi, tapi realitas praksis lokal yang menunjukkan regulasi saja tidak cukup (Khusairi Ahmad, 2025).

Kesimpulan

Penelitian berjudul “Reproduksi Sosial dan Praktik Pernikahan Dini: Analisis Struktur Kemiskinan, Budaya, dan Akses Pendidikan Masyarakat Pesisir Sampang Madura” menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di wilayah pesisir Sampang merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan simbolik dalam kehidupan sosial masyarakat. Pertama, kemiskinan struktural yang dialami keluarga nelayan berperan penting dalam membentuk habitus kemiskinan yang menormalisasi pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup. Keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan menyebabkan keluarga melihat pernikahan muda sebagai solusi sosial yang aman dan realistis bagi anak perempuan. Kedua, sistem nilai budaya Madura yang menekankan kehormatan (*ajhina*) dan kepatuhan terhadap otoritas keluarga memperkuat legitimasi moral terhadap praktik tersebut. Nilai ini menghasilkan modal simbolik yang membuat keluarga merasa memperoleh penghargaan sosial ketika menikahkan anaknya pada usia muda. Ketiga, rendahnya akses pendidikan dan lemahnya internalisasi nilai pendidikan dalam keluarga mempercepat siklus reproduksi sosial pernikahan dini. Pendidikan belum sepenuhnya dipandang sebagai modal budaya yang mampu mengubah posisi sosial, melainkan hanya sebagai fase sementara sebelum memasuki pernikahan. Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu bahwa praktik sosial tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara habitus, modal, dan ranah sosial. Dalam konteks masyarakat pesisir Sampang, ketiganya berinteraksi membentuk sistem yang secara tidak langsung melanggengkan praktik pernikahan dini lintas generasi. Dengan demikian, upaya intervensi sosial dalam mengatasi pernikahan dini harus mempertimbangkan dimensi struktural (kemiskinan, akses pendidikan) dan kultural (nilai kehormatan, religiusitas, dan norma gender) secara simultan. Program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi saja tidak cukup tanpa perubahan makna simbolik di tingkat budaya. Pendekatan berbasis komunitas yang sensitif terhadap budaya lokal menjadi kunci dalam mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan di wilayah pesisir Madura.

Daftar Pustaka

- Khusairi Ahmad, S. A. (2025). *Evaluating the Implementation of the Mariage Law in Madura: A 2025 Sytematic Literature Review (SLR) on Policy Effectiveness and Socio-Cultural Dynamics*. Applied Sciences (FJAS), 2889.
- Kurniasari Dyah Netty, S. E. (2022). *Gender Bias in Child Marriage in Madura*. Internasional Seminar and Call for Paper Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 48.
- Magda, P. D. (t.thn.). *Reproduksi Nilai-Nilai Agama Di Sd Negeri Ploso*. ejurnal.unesa, 31.



- Masthuriyah, S. (2015). Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham. *Musawa*, 144.
- Permatasari Dian, S. E. (2023). Determinant Factors Of Early Marriage On Adolescent Reproductive Health In Madura Island. *Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 35.
- Permatasasi Dian, S. E. (2022). Determinant Model Of Early Marriage On The Promotion Of Reproductive Health In Adolescents In Mandala Village. *Applied Nursing an Health*, 206.
- Yuni, W. K. (2020). Hubungan antara Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dengan Pernikahan Dini di Desa Panggung Kecamatan Sampang, Sampang. *Jurnal Kebidanan*, 60.